

EDISI : Selasa, 14 Mei 2019

# KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :  
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL  
SETDA KABUPATEN BULELENG



## KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Media : Bali Express

Kategori : Pendidikan

# Di Buleleng Seorang Siswa SMK Tidak Lulus

**SINGARAJA-** Seorang siswa SMK Negeri 3 Singaraja tidak lulus. Yakni atasnama I Ketut Satya Wiratama, 17. Karena tidak mengikuti ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Juga tidak mengikuti UNBK susulan serta Kompetensi Keahlian (UKK). Karena mengalami kecelakaan lalu lintas.

Satya Wiguna Wiratama yang duduk di jurusan TIPTL mengalami kecelakaan hingga menyebabkan Cidera Kepala Berat (CKB). Hal ini lantas membuat ia tidak dapat sekolah, hingga saat ini. "Hanya sempat ikut USBN. Nah pas UKK itu dia kecelakaan. Sampai sekarang masih proses pemulihan," ujar Kepala SMK Negeri 3 Singaraja, I Nyoman Suastika dikonfirmasi Bali Express Senin (13/5) siang.

Ditambahkan Suastika, pihak sekolah bersedia menerima Satya jika ingin kembali melanjutkan pendidikan. Syaratnya, Satya harus kembali duduk kelas XII, mengulang dari awal untuk bisa dinyatakan lulus.

"Kalau dilihat dari nilainya semua bagus. Sikapnya baik tidak ada masalah. Murni karena siswa tersebut tidak ikut ujian nasional karena kecelakaan. Kami siap menampung jika ingin kembali sekolah. Namun kami tidak bisa memaksa kalau orangtuanya memiliki pilihan lain," tuturnya.

Peserta ujian nasional (UN) SMA, SMK sederajat 2019 di Kabupaten Buleleng 4.676 orang. Hanya seorang dinyatakan tidak lulus ujian. Lantaran siswa tersebut mengalami kecelakaan, sehingga tidak mampu ikut UNBK dan UKK. Dia harus menjalani perawatan (opname) di RS. **(dik/ima)**



Media : Bali Express

Kategori : KEBUDAYAAN

# Disbud Buleleng Siap Sadur 96 Cakep Lontar

**SINGARAJA-** Dinas Kebudayaan Buleleng berencana menginventarisasi lontar yang luput dari identifikasi Penyuluh Bahasa Bali. Selain mengidentifikasi lontar, Disbud melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gedung Kirtyanya, berencana menyadur dan mendata 96 cakep lontar yang tersebar di tiga kecamatan. "Proyek" itu ditunjang dana alokasi khusus (DAK) pusat.

Dari 96 cakep lontar yang sudah berhasil diinventarisasi memuat banyak hal. Seperti geguritan, wariga, tenung, kanda, kawisesan. Yang rata-rata memang sudah ada di museum lontar Gedung Kirtya. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, Gede Komang mengungkapkan ada sembilan desa yang akan diidentifikasi. Desa itu tersebar di tiga kecamatan. Seperti Tejakula, Kubutambahan dan Banjar.

Proses identifikasi rencananya melibatkan perbekel yang ada di desa setempat. Sehingga masyarakat bisa lebih kooperatif untuk memberikan kesempatan bagi tim melakukan identifikasi lontar.

Dinas Kebudayaan juga akan melakukan penyaduran naskah lontar untuk memperkaya koleksi Gedung Kirtya. "Kegiatan ini di luar identifikasi yang dilakukan Penyuluh Bahasa Bali tahun-tahun sebelumnya. Hal ini juga menjawab kendala mereka yang terkadang prosesnya identifikasi terhambat karena tak ada izin dari yang punya," imbuhnya.

Sejauh Disbud sebut Gede Komang baru melakukan judul lontar, isi lontar dan jumlah lembar dan barisnya. Selanjutnya baru disadur, sehingga harapannya kedepan, pengetahuan yang tercatat di lontar-lontar itu bisa disosialisasikan ke masyarakat khususnya generasi muda," imbuh dia.

Mantan Kadis Sosial ini juga mengatakan proses inventarisasi lontar akan dilakukan bertahap setiap tahunnya. Bahkan akan menysasar 148 desa/kelurahan di sembilan kecamatan di Buleleng.

Tim Lontar Disbud Buleleng juga berencana akan memberikan edukasi kepada pemilik lontar tentang tata cara membersihkan, merawat dan menyimpan lontar-lontar itu sehingga umurnya bisa lebih panjang. (dik/ima)



Nama Media : Bali Express

Kategori : SATLANTAS

## Polisi Atensi Aksi Corat-Coret Pelajar

**SINGARAJA**--Sat Lantas Polres Buleleng mengatensi aksi konvoi hingga corat-coret seragam sekolah pada pengumuman kelulusan siswa SMA, SMK sederajat Senin (13/5) kemarin. Pelajar yang merayakan "kemerdekaan" itu terlihat wara-wiri di sejumlah jalan protokol di Kota Singaraja. Menggunakan sepeda motor secara bergerombol.

Aksi corat coret seragam ini dilakukan

oleh ratusan siswa di halaman GOR Bhuana Patra Singaraja. Untuk mengantisipasi aksi ugali-ugalan serta tauran, Satlantas Polres Buleleng turun memberikan imbauan, agar para siswa tidak melakukan euforia yang berlebihan.

Kasat Lantas Polres Buleleng, AKP. Putu Diah Kurniawandari mengatakan, pihak kepolisian lebih banyak memberikan himbauan kepada anak-anak tersebut, ketimbang melakukan

penindakan. Hal itu dilakukan mengingat, melalui himbauan anak-anak akan lebih sadar taat berlalulintas di jalan. Sehingga tidak melakukan aksi ugali-ugalan di jalan.

"Sudah diatensi dan dihimbau. Artinya, meskipun merayakan dengan penuh euforia tapi jangan berlebihan, jangan sampai tawuran dan tetap perhatikan keselamatan di jalan," jelasnya. **(dik/ima)**



**CORAT-CORET:** Sejumlah siswa Kelas XII SMA/SMK melakukan aksi corat-coret pakaian seragam di depan GOR Bhuana Patra Singaraja. Untuk merayakan kelulusan Senin (13/5) kemarin.



Nama Media : Bali Express

Kategori : Ranperda

# P2TP2A Desak Wujudkan Rumah Aman

## Terungkap Saat Rapat Ranperda Perlindungan Anak dan Perempuan

SINGARAJA - Pansus I DPRD Buleleng terus menggenjot pembahasan Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Khususnya dalam mewujudkan penyediaan rumah aman bagi korban tindak kekerasan perempuan dan anak. Keberadaan rumah aman dinilai penting diwujudkan, mengingat proses pemulihan bagi korban anak dan perempuan selama ini dinilai belum maksimal.

Rapat Pansus I DPRD Buleleng dilangsungkan di ruang gabungan komisi DPRD Buleleng, Senin (13/5) pagi kemarin. Rapat tersebut dipimpin langsung Ni Kadek Turkini, yang juga Ketua Fraksi PDIP Buleleng. Hadir pula Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Buleleng Made Riko Wibawa.

Dalam rapat itu, Turkini mengatakan, usulan dari P2TP2A terkait keberadaan rumah aman sudah ditampung. Sehingga Ranperda yang dibahas bisa menjadi landasan hukum terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah untuk melindungi perempuan dan anak yang ada di Buleleng.

Menurut Turkini, rumah aman juga sangat urgent. Sehingga dia berharap pihak pemerintah dapat secepatnya membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) rumah aman, termasuk tenaga harian lepasnya di luar dari pada pegawai negeri yang dipekerjakan. "Kami harapkan secepatnya. Akan kami bahas dengan dinas terkait. Sehingga 2020 bisa terwujud. Hari ini kami paripurna di internal, Kamis (16/5) penyampaian



RAPAT: Suasana pembahasan Ranperda Perlindungan Anak dan Perempuan dari Tindak Kekerasan di ruang DPRD Buleleng, Senin (13/5) siang.

pansus-pansus dengan tanggapan akhir bupati," ujar Turkini.

Sementara itu Riko Wibawa menjelaskan, keberadaan rumah aman sangat mendesak diwujudkan. Terlebih, kasus tindak kekerasan yang melibatkan anak dan perempuan di Buleleng tergolong tinggi.

Lanjut Riko, ketiadaan rumah aman membuatnya meski kerja keras untuk proses pendampingan psikolog terhadap para korban. Bahkan, pihaknya harus mendatangi satu per satu rumah para korban. Atau sebaliknya, korban lah yang harus mendatangi kantor P2TP2A Singaraja.

Proses pemulihan psikolog sebut Riko

tidak dapat dilakukan hanya satu atau dua kali saja. Tetapi harus dilakukan secara rutin. Padahal, kasus yang menjerat kaum perempuan dan anak seperti penyalahgunaan narkoba, kekerasan seksual, persetubuhan, pencurian, hingga pernikahan marak terjadi di Buleleng.

Sehingga, sambungnya dengan adanya rumah aman, pihaknya dapat memberikan pendampingan psikolog secara intensif. "Selama ini kami hanya sebatas memberikan pendampingan psikolog. Lalu kami anjurkan datang ke kantor atau kami yang datang ke rumah korban. Cuma itu kan tidak optimal. Kami ingin agar

korban saat pulang ke rumah, beban yang dirasakan semakin kecil," katanya.

Selain membutuhkan sarana dan prasarana seperti rumah aman, pihaknya juga membutuhkan tenaga psikolog, yang jumlahnya saat ini terbilang sangat sedikit. Dia pun menaruh harapan terhadap Ranperda ini. Sebab, optimis Ranperda ini sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Bila terbentuk, semua komponen dapat menjadikan Ranperda ini sebagai payung hukumnya. Karena Ranperda ini menjadi usulam kami, yang paling kami usulkan rumah aman, karena itu merupakan sebuah kebutuhan," tutupnya. (dik/wid)

Sub Bagian Dokumentasi dan I

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA K